

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap APM (Angka Partisipasi Murni) di Indonesia

Devliana Aurellin¹, Sri Ulfa Sentosa²

^{1,2} Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Korespondensi: devliana.aureline@gmail.com sriulfasantosa1961@gmail.com

Info Artikel

Diterima:

22 Mei 2023

Disetujui:

29 Juni 2023

Terbit daring:

01 Juni 2023

DOI: -

Sitasi:

Aurellin, D. & Sentosa, S, U (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap APM (Angka Partisipasi Murni) di Indonesia, 5(2).

Abstract

This study aims to determine the effect of government spending on education, per capita income and poverty on net enrollment rates in Indonesia. This research is descriptive and associative. The data used is secondary data from 33 provinces in Indonesia in 2014-2021 obtained from related agencies. This study uses panel data regression with the Random Effects Model approach assisted by Eviews 9 software. The variables used are high school enrollment rates (Y), government spending on education (X1), per capita income (X2), poverty (X3). The results of the study show that (1) government spending on education has a positive and significant effect on net enrollment rates at the high school level in Indonesia (2) per capita income has a positive and significant effect on net enrollment rates at the high school level in Indonesia (3) Poverty as a measure of the percentage of poor people has a negative and significant effect on net enrollment rates for secondary schools in Indonesia

Keywords: Net enrollment rate, Government spending on education, per capita income, Poverty

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pendapatan perkapita dan kemiskinan terhadap angka partisipasi murni di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif dan asosiatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari 33 provinsi di Indonesia tahun 2014-2021 yang diperoleh dari instansi terkait. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Random Effect Model dibantu software Eviews 9. Variabel yang digunakan adalah angka partisipasi murni jenjang sekolah menengah atas (Y), pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (X1), pendapatan perkapita (X2), kemiskinan (X3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengeluaran pemerintah untuk pendidikan memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka partisipasi murni pada tingkat sekolah menengah atas di Indonesia (2) Pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka partisipasi murni pada tingkat sekolah menengah atas di Indonesia (3) kemiskinan sebagai tujuan persentase penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap angka partisipasi murni sekolah menengah di Indonesia..

Kata Kunci : Angka partisipasi murni, Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, Pendapatan perkapita, Kemiskinan

Kode Klasifikasi JEL: H52, P36, P46

PENDAHULUAN

Pendidikan sangat penting untuk kesejahteraan anak-anak dan membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan (Unicef, 2012). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008 mengenai wajib belajar menerangkan bahwa merupakan tanggung jawab pemerintah serta pemerintah daerah guna meneruskan memberikan pendidikan minimal

kepada warga Negara Indonesia guna meningkatkan potensinya sehingga dapat hidup independen di masyarakat atau menyambungkan pendidikan.

Pendidikan merupakan aspek penting di kehidupan masyarakat dan memegang peran penting dalam mengembangkan keunggulan hidup. Semakin naik jenjang pendidikan di masyarakat, maka semakin bagus juga sumber daya manusianya. Semakin baik kualitas hidup kualitas sumber daya manusia, semakin baik jaminan kehidupan yang lebih baik.

Akses layanan pendidikan akan selalu ditingkatkan oleh pemerintah yaitu dengan mengoptimalkan layanan pendidikan yang lebih baik dan dapat bersaing dengan Negara. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk terus berupaya dengan meningkatkan SDM dengan menambah fasilitas berupa pembangunan sekolah khususnya sekolah menengah atas sebab sekolah menengah atas di Indonesia terbilang cukup rendah dibandingkan sekolah menengah pertama dan sekolah dasar sehingga diharapkan pembangunan sekolah menengah atas akan mencetak lulusan yang siap untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi (BPS, 2019).

Pernyataan tersebut diketahui bahwa salah satu yang menjadi masalah hingga saat ini di Indonesia adalah pendidikan yang masih belum merata. Faktor-faktor yang menyebabkan pendidikan di Indonesia tidak rata yaitu kemiskinan, sumber daya manusia (SDM), kualitas guru yang rendah, presentasi yang rendah serta sarana dan prasarana sekolah (BPS 2022).

Daerah di Indonesia yang kurang mutu pendidikannya yaitu Indonesia bagian timur. Sebab, tidak hanya sarana dan prasarana saja yang kurang tetapi tenaga pendidikannya juga kurang, menyebabkan masih dibutuhkannya guru dari luar daerah serta dana pembangun sekolah sehingga terlihat dengan hanya beberapa provinsi saja yang memperlihatkan prestasi, hanya beberapa provinsi seperti Indonesia Bagian Barat saja yang memadai fasilitas sarana dan prasarana serta memiliki kualitas dan sering muncul ke permukaan dengan prestasinya sedangkan Indonesia Bagian Timur lainnya belum terlihat (BPS 2018).

Dalam mencegah masalah ketimpangan angka partisipasi di bidang pendidikan, pemerintah pusat telah mewujudkan program guna memberikan angka partisipasi sekolah ini berupa pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), khususnya di Indonesia dengan RPJP 2005-2025 berusaha menaikkan Angka Partisipasi Murni (APM) keseimbangan pendidikan bagi semua penduduk. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan pada sebagian besar provinsi di Indonesia setiap tahunnya sebagaimana yang tertera pada tabel 1. yang menyajikan data alokasi anggaran pengeluaran pemerintah bidang pendidikan pada tahun 2014-2021.

Pada Table 1. memperlihatkan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tertinggi berada pada tahun 2019 sebesar 372.723.214 rupiah. Sedangkan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan yang terendah berada pada tahun 2013 sebesar 21.475.965 rupiah. Sementara itu jika dilihat secara keseluruhan di Indonesia laju pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dari tahun 2013-2019 mengalami fluktuasi.

Pendidikan yang diukur menggunakan angka partisipasi murni adalah indikator yang mengubah pertumbuhan ekonomi yang akan mengembangkan pendapatan masyarakat, pendidikan memajukan pertumbuhan ekonomi adapun sebaliknya pertumbuhan ekonomi mempercepat pendidikan suatu daerah maupun desa (Supiyanto et al, 2020). Dalam penelitian ini menggunakan pertumbuhan ekonomi yang diukur menggunakan

PDRB Perkapita mempengaruhi pendidikan yang di ukur menggunakan angka partisipasi murni.

Tabel 1. Alokasi Anggaran Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Tahun 2013-2019 (Dalam Rupiah)

Tahun	Anggaran Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (Rp)	Laju(%)
2014	9,483,904,789,059	-
2015	7,567,399,650,433	-20.21
2016	14,625,563,241,241	93.27
2017	41,174,096,175,007	181.52
2018	64,459,470,523,424	56.55
2019	129,785,110,566,541	101.34
2020	137,689,225,974,132	6.09
2021	105,368,384,188,166	-23.47

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia.(2022)

Terjadinya kenaikan pada PDRB Perkapita bakal mempengaruhi Angka Partisipasi Murni (APM) di Indonesia dimana dengan meningkatnya PDRB Per kapita di Inonesia maka angka partisipasi murni di Indonesia juga akan meningkat hal ini juga dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Elfarabi, 2018) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara PDRB perkapita terhadap angka partisipasi kasar serta penelitian yang dilakukan oleh (Fibriani, 2017) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara DPRB perkapita terhadap angka partisipasi murni.

Tabel 2. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan di Indonesia Tahun 2013-2019 (Dalam Juta Rupiah)

Tahun	Angka Partisipasi Murni SMA (%)	Laju(%)
2014	59.35	-
2015	59.71	0,61
2016	59.95	0,40
2017	60.37	0,70
2018	60.67	0.50
2019	60.84	0.28
2020	61.25	0.67
2021	61.65	0.65

Sumber : Badan Pusat Statistik,(BPS 2022)

Selain pertumbuhan ekonomi, kemiskinan juga dapat mempengaruhi angka partisipasi murni sekolah menengah atas di Indonesia dimana kemiskinan di Indonesia yang diukur dengan presentase penduduk miskin yang mana presentase penduduk miskin terendah pada tahun 2019 sebesar 9,31 persen. Sedangkan presentase penduduk miskin tertinggi berada pada tahun 2015 sebesar 11,17 persen. Ini menunjukkan bahwa presentase penduduk miskin mengalami penurunan setiap tahunnya namun berbeda pada tahun 2015 yang mengalami peningkatan di Indonesia. Rata-rata laju presentase penduduk miskin di Indonesia cukup mengalami fluktuasi, yang mana ini akan berpengaruh terhadap angka partisipasi murni SMA, semakin menurun presentase penduduk miskin maka angka partisipasi murni akan semakin meningkat di Indonesia, sebaliknya jika presentase penduduk miskin meningkat maka angka partisipasi murni di setiap provinsi akan menurun. Pernyataan ini dikuatkan oleh (Herlita et al, 2019) yang menyampaikan yaitu kemiskinan mempunyai pengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap angka partisipasi kasar SMK.

Menurut Marginson (2019). Teori modal manusia mengasumsikan bahwa pendidikan menentukan produktivitas marjinal tenaga kerja dan ini menentukan pendapatan, sejak tahun 1960-an modal manusia telah mendominasi ekonomi, kebijakan dan pemahaman publik mengenai hubungan antara pendidikan dan pekerjaan. Dimana pendidikan tinggi adalah persiapan untuk bekerja. Jhingan (2010) mendefinisikan bentuk modal manusia sebagai metode menghasilkan dan mengembangkan keterampilan, pendidikan dan keahlian penduduk yang berpartisipasi dalam menentukan pembangunan ekonomi dan politik suatu Negara. Sehingga, pembentukan sumber daya manusia digunakan sebagai sumber daya untuk meningkatkan produktivitas sumberdaya manusia dan kemudian berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi

Menurut (Todaro & Smith, 2011), konsep modal manusia adalah stok pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, kesehatan dan aspirasi yang merupakan hasil dari pengeluaran atau pengeluaran untuk program pendidikan, perawatan kesehatan, dan pemeliharaan. Disuatu sisi, investasi infrastruktur diperlakukan untuk mendorong pertumbuhan. Namun disisi lain, investasi juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan menyediakan tenaga kerja yang berkualitas, peningkatan sumber daya manusia sebenarnya memiliki manfaat positif bagi pertumbuhan ekonomi juga.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah populasi kelompok usia sekolah tertentu versus kelompok usia yang sesuai yang saat ini bersekolah di tingkat pendidikan yang sesuai (berdasarkan usia populasi yang menawarkan tingkat usia sekolah tersebut. Sejak tahun 2007, pendidikan nonformal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan (BPS, 2022). Menurut teori modal manusia dikatakan pendidikan yang tinggi merupakan suatu faktor paling utama yang mewujudkan individu yang mempunyai produktivitas tinggi (Schultz, 1961). Semakin meningkat pendidikan seseorang maka semakin meningkat juga tingkat produktivitas seseorang tersebut dalam proses pembangunan dan mengakibatkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi juga.

Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan sebagian lagi untuk membiayai kegiatan pembangunan. Beberapa bidang penting yang akan didanai pemerintah antara lain membayar pegawai-pegawai pemerintah, mendanai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, mendanai perbelanjaan buat angkatan bersenjata, serta mendanai beraneka jenis infrastruktur yang penting bagi pembangunan. Pengeluaran ini akan meningkatkan pengeluaran total dan meningkatkan tingkat kegiatan ekonomi (Sukirno, 2004).

Penelitian Herrera & Pang (2005) menilai efisiensi pengeluaran pemerintah berkembang di bidang kesehatan dan pendidikan. Pemerintah menggunakan pengeluaran perkapita disektor pendidikan dan kesehatan sebagai input dan output diindeks oleh angka

partisipasi, angka partisipasi sekolah menengah, angka melek huruf kaum muda, rata-rata tahun sekolah, kelulusan sekolah dasar, kelulusan sekolah menengah, dan prestasi akademik di sektor pendidikan. Dan harapan hidup yang disesuaikan dengan disabilitas (DALE) untuk sektor kesehatan.

Pendapatan perkapita menurut Sukirno (2004) mengatakan bahwa pendapatan rata-rata penduduk suatu negara atau daerah pada suatu periode tertentu yang biasanya satu tahun pendapatan perkapita biasanya dihitung berdasarkan pendapatan daerah dibagi dengan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai ukuran kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu negara maupun daerah. Kemiskinan merupakan prasyarat ketidakmampuan ekonomi untuk melengkapi standar hidup umum masyarakat di wilayah tersebut. Situasi kecacatan ini merupakan kemampuan berproduksi rendah untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa sandang pangan (BPS, 2022).

Pada prinsipnya, taraf hidup masyarakat bukan hanya cukup makan, tetapi juga kesehatan dan pendidikan serta tempat tinggal yang bagus merupakan salah satu tataraf hidup atau kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Ketika masyarakat dikatakan miskin jika mempunyai penghasilan jauh dari rata-rata penghasilan jadi tidak memiliki kemungkinan untuk mensejahterakan dirinya. Berdasarkan keadaan kemiskinan yang dilihat sebagai bentuk persoalan multidimensional, kemiskinan memiliki beberapa bentuk yaitu, kemiskinan tersebut kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan structural.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang dipakai di penelitian ini yaitu data sekunder yaitu data yang berasal dari situs resmi yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel, yaitu data yang diambil dari berbagai unit pada beberapa titik waktu dalam suatu periode tertentu yang merupakan hasil penggabungan *cross section* dan *time series*. Penelitian ini data *cross section* ditunjukkan oleh data 33 Provinsi di Indonesia, sedangkan data *time series* ditunjukkan oleh data yang diambil dari periode waktu tahun 2014-2021. Data yang diteliti meliputi angka partisipasi murni jenjang sekolah menengah atas, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, PDRB perkapita dan presentase penduduk miskin. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *Random Effect Model*

Model yang dibentuk dalam penelitian ini adalah :

$$\text{APM SMA}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{PPn}_{it} + \beta_2 \text{PP}_{it} + \beta_3 \text{KG}_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Dimana APM SMA adalah angka partisipasi murni jenjang SMA, PPen adalah Pengeluaran Pemerintah bidang pendidikan, PP adalah Pendapatan Perkapita K adalah Kemiskinan ε adalah Error term, I adalah Cross-Section, t adalah time Series, α adalah nilai konstanta atau intersep.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menguji tentang pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap angka partisipasi murni jenjang sekolah menengah atas di Indonesia. Hasil pengujian persamaan menggunakan aplikasi *Eviews9* dapat diketahui bagaimana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Dari estimasi regresi panel menggunakan *Random Effect Model* diperoleh persamaan regresi panel sebagai berikut:

$$APM SMA_{it} = 52,22 + 5,10n_{it} + 8,00P_{it} - 0,36G_{it} \quad (2)$$

Tabel 3. Hasil Estimasi Random Effect Model

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 11/16/22 Time: 15:27
 Sample: 2014 2021
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 33
 Total panel (unbalanced) observations: 264
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	62.22181	1.346309	46.21658	0.0000
X1	5.103751	1.827359	2.792965	0.0056
X2	8.001288	1.250255	6.399725	0.0000
X3	-0.366228	0.052474	-6.979279	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			6.115669	0.9905
Idiosyncratic random			0.598775	0.0095
Weighted Statistics				
R-squared	0.438161	Mean dependent var	2.133825	
Adjusted R-squared	0.431628	S.D. dependent var	0.799880	
S.E. of regression	0.603060	Sum squared resid	93.82989	
F-statistic	67.06880	Durbin-Watson stat	0.641472	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.036529	Mean dependent var	61.46084	
Sum squared resid	10393.36	Durbin-Watson stat	0.005791	

Sumber: Data Diolah, 2022

Dari hasil table estimasi, kita dapat menemukan t-hitung untuk masing-masing variabel. Untuk mencari nilai pada table t, carilah = 0,05 pada derajat kebebasan total (df) $n - k$. k adalah jumlah variabel independen. Kemudian cari $264 - 3 = 261$. Uji signifikan 0,05 menghasilkan nilai t-tabel sebesar 1,65.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Murni SMA Provinsi-provindi di Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis data pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap angka partisipasi murni SMA Provinsi-provinsi di Indonesia. Artinya ketika pengeluaran pemerintah bidang pendidikan meningkat maka angka partisipasi murni Provinsi-provinsi di Indonesia akan meningkat. Hal ini dapat dilihat pada estimasi penelitian ini yang koefisien dari variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dengan koefisien sebesar 5,10. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan mempengaruhi angka partisipasi murni SMA

Provinsi-provinsi di Indonesia. Hal ini sesuai Teori *human capital* yang mengatakan ketika seseorang mampu menaikkan pempdapatannya dengan peningkatan pendidikan. Ketika menambah satu tahun sekolah artinya disatu pihak, meningkatkan kecakapan kerja dan pendapatan individu. Namun, orang lain menanggukhan penerimaan, penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti sekolah tersebut (Simanjuntak, 1998;70).

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan weriantoni et al(2017) yang menunjukkna bahwa Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Angka partisipasi murni di Sumatera Selatan. Penelitian lain yang juga mendukung hasil peneltian ini adalah Rahmadi (2020) yang menyimpulkan bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap rata lama sekolah di Indonesia.

Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Angka Partisipasi Murni SMA Provinsi-provinsi di Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis data pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini ditemukan bahwa pendapatan perkapita memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap angka partisipasi murni SMA Provinsi-provinsi di Indonesia. Artinya ketika pendpatan perkapita meningkat maka angka partisipasi murni Provinsi-provinsi di Indonesia akan meningkat. Hal ini dapat dilihat pada estimasi penelitian ini yang koefisien dari variabel pendapatan perkapita dengan koefisien sebesar 8,00. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan perkapita mempengaruhi angka partisipasi murni SMA Provinsi-provinsi di Indonesiateori wagner yakni ketika pendapatan per kapita nilai naik maka secara langsung pengeluaran pemerintah juga akan naik terutama disebabkan karena pemerintah harus menangani hubungan yang muncul di masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya. Salah satu Penyebabnya yakni meningkatnya fungsi kesejahteraan.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh pena (2007), Huda (2012), dan Purusa (2013). PDRB perkapita merupakan faktor utama yang menentukan angka partisipasi murni SMA di Indonesia. Serta penelitian yang di lakukan Elfarabi (2018) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara PDRB Perkapita terhadap angka partisipasi kasar.

Pengaruh Kemiskinan Terhadap Angka Partisipasi Murni SMA Provinsi-provinsi di Indonesia

Berdasarkan hasil analisis data pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini ditemukan bahwa kemiskinan yang ditujukan presntase penduduk miskin Provinsi-provinsi di Indonesia memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap angka partisipasi murni SMA Provinsi-provinsi di Indonesia. Artinya ketika kemiskinan meningkat maka angka partisipasi murni Provinsi-provinsi di Indonesia akan menurun, sebaliknya ketika kemiskina menurun makan angka partisipasi murni akan meningkat . Hal ini dapat dilihat pada estimasi penelitian ini yang koefisien dari variabel kemiskinan dengan koefisien sebesar -0.36. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan mempengaruhi angka partisipasi murni SMA Provinsi-provinsi di Indonesia

Ini sesuai dengan teori kemiskinan berupa distribusi pendapatan Menurut Sukirno (2013) distribusi penghasilan atau ketimpangan pendapatan adalah salah satu sudut pandang dalam persoalan kemiskinan yang harus diawasi sebab pada awalnya distribusi penghasilan berupa ukuran kemiskinan relatif. Hasil penelitian ini di perkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadi (2020) bahwa Kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap RLS. Serta penelitian yang dilakukan oleh Suryadarma (2010) yang mengemukakan bahwa kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyelesaian sekolah di tingkat SMP.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan menggunakan model random effect refleksi penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap angka partisipasi murni sekolah menengah atas Provinsi-provinsi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang digunakan PDRB perkapita memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap angka partisipasi murni sekolah menengah atas Provinsi-provinsi di Indonesia. Kemiskinan yang menggunakan indikator presentase penduduk miskin memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap angka partisipasi murni sekolah menengah atas Provinsi-provinsi di Indonesia. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap angka partisipasi murni sekolah menengah atas Provinsi-provinsi di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Akhmad Noval Huda & Hadi Sasana. 2012. ANALISIS DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP OUTCOMES PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN. JOURNAL OF ECONOMICS. Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013, Halaman 1.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2019). *Potret Pendidikan Statistik Pendidikan Indonesia 2019*. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Neraca Rumah tangga Indonesia 2017-2019*. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Angka Partisipasi Murni* Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Giovanni Ridzky. 2018. Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016. *Journal of Economics Development analysis*.
- Kiss, J. T. (2012). The Rate of Return to Investment in Tertiary Education in Hungary, 1999-2008. *International Journal of Business & Social Science*, 3(12), 197–203.
- Marginson Simon. (2019). Limitations of human capital theory. *Studies in Higher Education* (Vol.44,2019, Issue 2)
- Mincer, J., & Polachek, S. (1974). Family Investments in Human Capital: Earnings of Women. *Journal of Political Economy*, 82(2), S76–S108. <http://www.jstor.org/stable/1829993>
- Nurkholis Afid. 2016. TEORI PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA. JOURNAL OF ECONOMICS.
- Putro, P. R. (2016). PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP TINGKAT . *JURNAL PERBENDAHARAAN, KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN*
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ke Tiga Jilid 1* (11th ed.). Erlangga.